

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Sukaraja)

Marlina Banjarnahor^{1*}, Darmo H. Suwiryo², Evi Martaseli³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

^{1*} marlinabanjarnahor04@gmail.com

Alamat: Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat
43113

Korespondensi penulis: marlinabanjarnahor04@gmail.com

Abstract. *Increasing the well-being and welfare of the Indonesian people and state cannot be separated from the management of the regional economy. Decision makers in regional public authorities need to pay attention to regional financial management, implement good accountability and openness in this field by implementing a financial accounting system. This research aims to determine and explain the analysis of the implementation of the government financial accounting system at the Sukaraja Sukabumi District office. This research was conducted using qualitative descriptive research. The selection of informants in this research uses the method of selecting informants or sources who have certain objectives in accordance with the research subject. The data sources used are primary and secondary sources. Data collection was carried out through field research through observation, interviews and documentation. The results of this research show that even though the implementation is still not optimal, the implementation of accounting at the Sukaraja sub-district government Finance and Assets Agency, Sukabumi Regency is in accordance with the established guidelines. The application of accounting has been in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 as well as the completeness of the financial statement items has been in accordance with the provisions of the SKPD financial statements consisting of Budget Realization Reports, Balance Sheets, and Notes on Financial Statements. The recording and classification of transactions comes from bookkeeping evidence, which is then recorded in a journal book.*

Keywords: *Accounting, Analysis, Systems*

Abstrak: Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negara Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan ekonomi daerah. Para pengambil keputusan di otoritas publik tingkat daerah perlu memberikan perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah, mempraktekkan akuntabilitas dan keterbukaan yang baik di bidang ini dengan penerapan sistem akuntansi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor Kecamatan Sukaraja Sukabumi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan informan atau narasumber yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan subjek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui field research melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal penerapan akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset pemerintah kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Penerapan akuntansi telah sesuai dengan PP NO 71 Tahun 2010 Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisas Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

Kata Kunci : Akuntansi Keuangan, Analisis, Sistem

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan reformasi yang progresif di Indonesia telah membuka perspektif baru bagi otoritas baru dalam pengelolaan keuangan publik baik di tingkat negara maupun daerah. Dengan adanya diferensiasi sistem pengelolaan ekonomi dan banyaknya pemekaran daerah baru, maka sistem administrasi juga mengalami perubahan, khususnya dalam pengelolaan ekonomi daerah. Hal ini menjadi perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan. Bagian keuangan publik yang dikelola langsung oleh negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola langsung oleh pemerintah kota. Baik APBN dan APBD adalah inti dari akuntansi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi negara menjadi sangat penting.

Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negara Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan ekonomi daerah. Para pengambil keputusan di otoritas publik di tingkat daerah kini memiliki perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah harus mempraktekkan akuntabilitas dan keterbukaan yang baik di bidang ini.

Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD Kecamatan Sukaraja adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Sukaraja selama satu periode pelaporan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada SKPD Kecamatan Sukaraja dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan anggaran saldo, anggaran lebih, surplus / defisit, aset arus kas suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan wewenang kepada Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan Aset Daerah berupa laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Basis yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD Kecamatan Sukaraja adalah basis kas menuju akrual, yaitu dimana untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas dan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Basis kas untuk laporan Realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas

diterima di rekening kas umum daerah oleh entitas pelaporan sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal penerapan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kecamatan Sukaraja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sampai dengan laporan ini dibuat telah mempunyai suatu Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi). Kebijakan akuntansi tersebut berbasis akrual Laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban pihak atau staf bagian keuangan pada suatu pemerintahan dan laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Karena laporan tersebut merupakan gambaran keuangan berupa transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu entitas. Laporan keuangan juga merupakan sumber informasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan, begitu juga bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor.

Perubahan mendasar telah terjadi dalam pelaksanaan tujuan reformasi, termasuk UU No.1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32. Keputusan No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud meliputi keleluasaan untuk memobilisasi sumber pendanaan, menentukan arah penggunaan anggaran, sasaran dan tujuan

Perubahan tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan tersebut mengarahkan semua departemen pemerintah daerah untuk segera mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan mereka. Daerah (SAKD) yang sudah menggunakan metode pembukuan double entry dari sistem akuntansi berbasis kas kemudian diubah menjadi basis akrual dengan maksud Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan Untuk Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004, yang diganti dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 71 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan Sistem adalah program daerah, administrator, peralatan, dan elemen lain dari rangkaian sistem dalam suatu organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi akuntansi, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan. Jadi diharapkan SAKD mencatat dan melaporkan. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi/lembaga pemerintah daerah harus lebih hati-hati dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berasal dari bahasa Latin (*sistema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (KBBI, 2017). Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dijelaskan pula bahwa masih terdapat kendala dalam penggunaan SAKD dan penyampaian laporan keuangan dalam proses penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pelatihan pengelola keuangan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, baik itu lembaga maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci untuk menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakekatnya, sumber daya manusia adalah orang-orang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kantor Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, yaitu Pembuatan laporan keuangan dalam segi pengerjaan nya di Tahun 2021 sudah menggunakan sistem sedangkan di Tahun 2022 adanya transisi aplikasi yang baru sehingga masih menggunakan sistem manual. Apalagi dengan terjadinya covid-19 tahun 2021 menyebabkan adanya dampak pengurangan anggaran/penurunan signifikan untuk pembiayaan. Karena adanya berbagai oknum antara realisasi anggaran dalam akuntansi dan aset yang mencatatnya saling menunggu sehingga mengakibatkan ketidakakuratan pencatatan laporan keuangan dan keterlambatan penyampaiannya. Pihak aset harus memasukkan dan melengkapi nilai aset terlebih dahulu saat membuat akun keuangan, misalnya dengan menghapus barang yang rusak berat dan aset yang terdepresiasi. Sumber daya manusia yang berkualitas belum digunakan untuk mendukung sistem informasi dan pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian akuntansi badan pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan Sukaraja kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa, “Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi masih belum optimal begitu juga dengan laporan keuangannya, serta Kantor Camat Sukaraja dalam proses penyusunan laporan keuangan masih harus dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kecamatan Sukaraja agar laporan keuangan yang mereka buat tidak mengalami kesalahan dan keterlambatan pada saat pelaporan.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan di daerah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi?
- b. Apakah kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap penerapan sistem keuangan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi?
- c. Apakah Penyusunan Laporan Keuangan Telah Sesuai dengan penerapan sistem akuntansi ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan Metode dan proses yang digunakan untuk menangkap dan melaporkan data keuangan yang diberikan kepada perusahaan atau entitas komersial lainnya. Niswonger, dkk. (1999) membahas gagasan sistem akuntansi sebagai teknik dan proses untuk mengumpulkan, mengkategorikan, meringkas, dan melaporkan data keuangan mengenai dan aktivitas perusahaan. Sistem akuntansi Menurut Mulyadi, (2017) adalah koordinasi formulir, catatan, dan laporan yang diatur untuk menyampaikan data keuangan yang dibutuhkan manajemen untuk mengatur bisnis.

Akuntansi Pemerintah

Menurut Deddi Nordia (2023), akuntansi pemerintahan cabang adalah informasi akuntansi untuk memfokuskan diri dalam diskusi operasional di departemen pemerintah. Basis pengetahuan pemerintahan ini memberikan informasi tentang bidang Administrasi Pertahanan Negara. Selain bagian yang menghambat pembayaran APBN, sudah ada kesepakatan dalam UU yang mengaturnya. Lili Sadel mengatakan, kepercayaan publik juga

dapat ditemukan pada perwalian swasta atau perwalian kolektif, yang fokus pada transaksi bisnis dimulai dengan pembuatan perjanjian dan diakhiri dengan persetujuan pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono 2021, 2) Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang diaplikasikan guna memperoleh informasi untuk maksud dan manfaat yang jelas. Memiliki empat poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu pendekatan bersifat ilmiah, data yang diperoleh, tujuan yang ingin dicapai, dan kegunaan yang spesifik dari penelitian tersebut. Sehubungan dengan judul yang diajukan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif secara kualitatif membahas banyak pendekatan untuk mengumpulkan, mengkategorikan, dan mengevaluasi data untuk menjawab masalah yang dihadapi.

Situasi Sosial

Penelitian kualitatif melihat kepada permasalahan yang muncul dalam situasi sosial yang hasilnya tidak dilakukan pada populasi, tetapi dilakukan pada situasi sosial yang menunjukkan kesamaan dengan situasi yang diteliti. Sampel penelitian kualitatif ini bukan responden melainkan informan yang terlibat dalam penelitian.

Situasi sosial dalam penelitian ini memenuhi dari ketiga elemen tersebut yaitu diantaranya:

- a. Pelaku (Actors): kasubag keuangan, bendahara, pengelola administrasi pemerintah, dan pengelola bagian akuntansi yang ada di kantor Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- b. Tempat (Place): Kantor Kecamatan Sukaraja yang beralamat di Jl. Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat.
- c. Aktivitas (Activity): sistem akuntansi keuangan pemerintah di Kantor Kecamatan Sukaraja.

Teknik Analisis data

Menemukan dan mengumpulkan data secara metodis dari observasi, wawancara, dan dokumen adalah proses analisis data. Setelah mengatur data, kemudian peneliti dapat memilih data yang akan digunakan, Dan mana yang akan diperiksa sangat penting, karena akan menarik kesimpulan yang jelas baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data, hasil interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan

triangulasi teknik sebagai metode untuk memastikan keakuratan informasi data yang dikumpulkan.

4. HASIL PENELITIAN

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam hal penerapan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kecamatan Sukaraja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sampai dengan laporan ini dibuat telah mempunyai suatu Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 24). Kebijakan akuntansi tersebut berbasis akrual

Sampai dengan 31 Desember 2017 ini Pemerintah Kecamatan Sukaraja dalam Laporan Keuangan telah menerapkan Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran dan Batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi. Dimana nilai satuan minimum kapitalisasi untuk belanja/perolehan aset tetap (barang modal) pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
- c. Pengeluaran untuk per-satuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak, hewan, dan tanaman sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- d. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan non buku serta barang bercorak kesenian/kebudayaan
- e. Belanja modal yang mempunyai nilai aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dicatat didalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstra komptabel)

Dalam penyajian Aset tetap di Neraca per 31 Desember 2018, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menerapkan penyusutan atas Aset Tetap sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam wawancara tersebut mengandung 4 indikator yang diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu : Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan. Tujuan dari pengambilan indikator tersebut, yaitu untuk melakukan analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada penerapan system akuntansi keuangan pada Kantor Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

Dari tabel diatas bisa dilihat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sudah sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mencatat pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi, dengan menyajikan 4 komponen laporan keuangan diantaranya :

- a. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi dari pendapatan dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun yang menunjukkan tingkat capaian target.
- b. Neraca mencatat kas di bendahara pengeluaran, piutang lainnya, persediaan, asset tetap, asset lain-lain, utang jangka pendek lainnya, utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima dimuka, utang pada pihak ketiga, dan ekuitas.
- c. Laporan Operasional Kantor Kecamatan Sukaraja menyajikan seluruh kegiatan operasional keuangan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus Defisit- LO, R/K PPKD, Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Dan Ekuitas Akhir.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disajikan pada bab 2 menurut Sistem akuntansi Menurut (Mulyadi,2017) adalah koordinasi formulir, catatan, dan laporan yang diatur untuk menyampaikan data keuangan yang dibutuhkan manajemen untuk mengatur keuangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan system akuntansi keuangan pemerintah pada kantor kecamatan sukaraja.

Walaupun sekarang sudah menggunakan aplikasi secara online dalam penyusunan laporan keuangan tetapi untuk pencatatan laporan keuangan sampai saat ini masih menggunakan secara manual. Bisa dikatakan mudah dalam penginputan secara online namun jika terjadi kesalahan saat penginputan secara online berdampak terhadap hasil akhir pelaporan. Sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki pemahaman dalam bidang akuntansi agar pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan Laporan Keuangan Telah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010

Laporan keuangan dibuat untuk menghasilkan informasi mengenai keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah undang-undang yang mengatur penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman dalam mengatur sebuah proses untuk mengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, mengklasifikasikan, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan keuangan. (Moenek et al., 2020:24)

Berkaitan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan pembukuan laporan keuangan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah karena di dalam pencatatan pembukuan di Kecamatan Sukaraja dibuat dalam bentuk komponen laporan keuangan yang berpedoman PP No.71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam hal penerapan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kecamatan Sukaraja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Kompetensi sumberdaya manusia di Kecamatan Sukaraja masih belum optimal hal ini di karenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan yang terbatas. Terbatas nya jumlah Sumber daya Manusia (SDM) dan keterbatasan sarana prasarana penunjang, serta kurang nya kesadaran akan tertib administrasi. Kantor Camat Sukaraja dalam proses penyusunan laporan keuangan masih harus dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan Sukaraja agar laporan keuangan yang mereka buat tidak mengalami kesalahan dan keterlambatan pada saat pelaporan.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pun masih belum optimal begitu juga dengan laporan keuangannya, Meski begitu Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah nya telah sesuai dengan PP NO 71 Tahun 2010 Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya

telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Meskipun masih perlu Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

Saran

Penerapan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kecamatan Sukaraja memang sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, namun dalam penerapannya masih banyak kendala dalam berbagai aspek, maka dari itu perlu diadakan evaluasi Kembali untuk melihat apa saja kendala yang menjadi faktor penghambat, dan melakukan perbaikan.

Perlu adanya peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia, melalui pelatihan khusus terkait penerapan sistem akuntansi keuangan, perbaikan dalam segi sarana prasarana penunjang, serta peningkatan jumlah sumberdaya manusia dan melakukan pembagian tugas dengan penuh pertimbangan. Ada baiknya setiap posisi diisi oleh Sumberdaya manusia yang memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai.

Agar laporan keuangan Kecamatan Sukaraja dapat lebih dipahami dan untuk menghindari kesalah pahaman pengguna dalam membaca Laporan Keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang menggunakan sistem berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

DAFTAR REFERENSI

- Dzaky, D., & Widaningsih, S. (2023). Tinjauan Minat Beli Produk Indihome Studi Kasus Di Pt Telkom Indonesia Kandatel Solok Tahun 2022. *Eproceedings Of Applied Science*, 9(2).
- Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jakarta (Id): Sekretariat Negara*.
- Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jakarta: Legalitas*.
- Jermias, R. R. W. (2016). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Gaji Dan Upah Pada Pt. Bank Sinarmas Tbk. Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

- Rahmawati, E. (2019). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung)* (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Widiastiawati, B., & Hambali, D. (2020). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Umkm Ud Sari Bunga. *Journal Of Accounting, Finance, And Auditing*, 2(02), 38-48.